



## Pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di bidang pendidikan pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan

Rua Wahyu Ahlillah, Kartika Rachma Sari<sup>2</sup>, Anggreaini Oktarida<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Negeri Sriwijaya

<sup>1</sup>[ruawahyuahlillah860@gmail.com](mailto:ruawahyuahlillah860@gmail.com)

### Info Artikel :

Diterima :

5 Maret 2023

Disetujui :

20 Maret 2023

Dipublikasikan :

23 Maret 2023

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di bidang Pendidikan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dikhususkan hanya pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Data penelitian menggunakan data sekunder. Data penelitian diperoleh dari laporan realisasi pendapatan dan Neraca Pendidikan Daerah per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah sampel sebanyak 17 Kabupaten/Kota dengan total pengamatan 85 laporan realisasi anggaran dan Neraca Pendidikan Daerah per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Teknik analisis data regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di bidang Pendidikan secara parsial namun Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja daerah di bidang Pendidikan secara parsial. Dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di bidang Pendidikan secara simultan.

**Kata kunci:** Dana bagi hasil, Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus, Belanja daerah

### ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Local Original Revenue on Regional Expenditures in the Education Sector in Regencies and Cities in South Sumatra Province. This study is focused only on Regencies/Cities in South Sumatra Province. The research data uses secondary data. The research data was obtained from the revenue realization report and Regional Education Balance per Regency/City in South Sumatra Province. The number of samples was 17 Regencies/Cities with a total observation of 85 budget realization reports and Regional Education Balance per Regency/City in South Sumatra Province. The data analysis technique was multiple linear regression with the help of SPSS software version 24. The results of the study showed that the Special Allocation Fund and General Allocation Fund had a positive and significant effect on Regional Expenditures in the Education Sector partially, but the Revenue Sharing Fund and Local Original Revenue did not affect Regional Expenditures in the Education Sector partially. It can be concluded that Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Local Original Revenue have a positive and significant effect on Regional Expenditures in the Education Sector simultaneously.*

**Keywords:** Revenue sharing funds, general allocation funds, special allocation funds, regional spending



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Indonesia telah memasuki era dimana dalam kehidupan masyarakatnya dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan daerah akhir – akhir ini membawa dampak terhadap hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Otonomi yang luas serta pengembangan keuangan yang lebih adil, proporsional dan transparan antar tingkat pemerintahan menjadi salah satu tuntutan daerah dan masyarakat, dilansir dari wikipedia “Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Undang Undang No 1 Tahun 2022 .

Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dalam teksnya Ferdiansyah et al., (2018), Fauzi (2019) dan Monicha (2019) peran serta masyarakat dan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik. Memasuki era desentralisasi yang dimulai pada tahun 2001, Pemerintah Pusat tetap memainkan peranan penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang didesentralisasikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) Khususnya dalam hal keuangan.

Untuk itu Pemerintah Pusat melakukan transfer dana ke daerah melalui dana perimbangan yang menjadi salah satu sumber pendaptan daerah yang nantinya akan di realisasikan untuk keperluan daerah, dana perimbangan ini di bagi menjadi 3 bagian Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Ketiga dana perimbangan tersebut mempunyai tujuan dan sifat dasar berlainan satu dengan yang lain, Semua dana perimbangan tersebut disalurkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Oleh karena itu dalam pengelolaannya Pemda harus mempertanggung jawabkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dana Bagi Hasil adalah dana yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah berdasarkan undang undang No 1 Tahun 2022.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang dialokasikan kembali kepada daerah dengan pembagian sebagaimana Undang-Undang No 1 Tahun 2022, dana alokasi umum bersifat hibah umum oleh karenanya pemda memiliki kebebasan dalam memanfaatkannya tanpa campur tangan Pemerintah Pusat.

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kapda Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dalam undang undang No 1 Tahun 2022.

Dana Alokasi Khusus harus mengikuti rambu- rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, Dana Alokasi Khusus dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional (Febriani & Asmara, 2018). Daerah dapat menerima dana alokasi khusus apabila memenuhi tiga kriteria yaitu, kriteria umum berdasarkan indeks fiskal netto, kriteria khusus berdasarkan peraturan perundangan dan karakteristik daerah, kriteria teknis berdasarkan indeks teknis bidang terkait Undang Undang No 1 Tahun 2022.

Selanjutnya Pemerintah Daerah juga memiliki sumber pendapatannya sendiri yaitu pendapatan asli daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil peengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Dana perimbangan dan pendapatan asli daerah ini merupakan sumber pendapatan yang terpenting di dalam APBD sehingga pada penelitian ini lebih memfokuskan mengenai dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah di bidang pendidikan (Adyatma & Oktaviani, 2015). Mengapa harus bidang pendidikan di karenakan bidang pendidikan ini merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar indonesia memiliki generasi generasi penerus bangsa yang cerdas yang mampu memajukan negara ini sebagaimana yang telah di amanatkan di dalam undang undang dasar 1945 alinea ke 4 "Mencerdaskan kehidupan bangsa" yang merupakan salah satu ide dasar dan juga alasan dalam membentuk pemerintahan negara Indonesia, agar kita memiliki masyarakat terdidik dan cerdas.

Kemudian Pasal 31 UUD 1945 pada ayat 1 berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".Konstitusi negara ini menghendaki adanya kesempatan yang memadai bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, yang selanjutnya dimaknai dengan kewajiban negara untuk

memberikan pemerataan pendidikan kepada setiap warga negara, Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat (Simanjuntak et al., 2013).

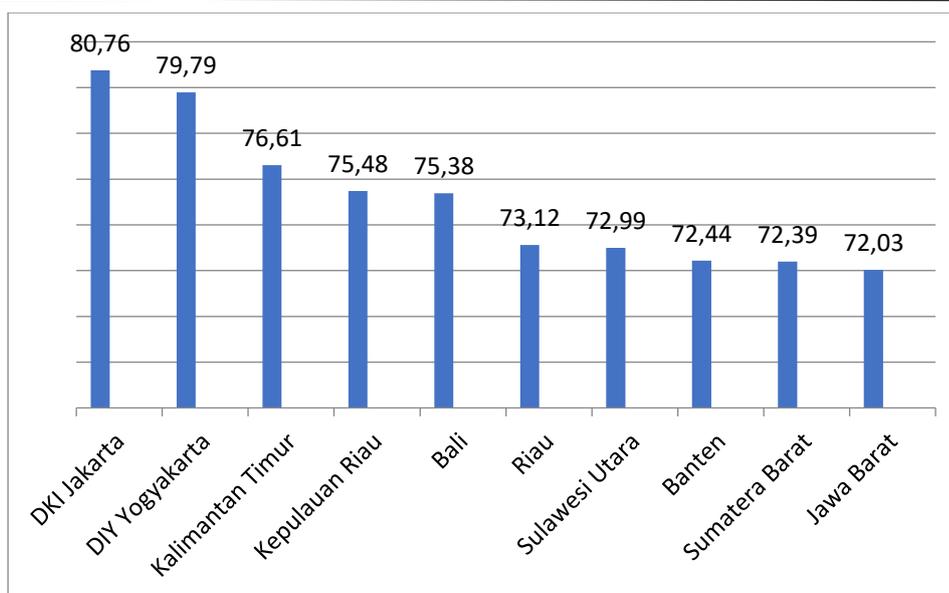
Oleh karena pentingnya sektor pendidikan tersebut bentuk keseriusan Pemerintah dan DPR tertuang dalam Undang Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “ Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional “ dan di perinci lagi dalam UU Nomor 20 tahun 2003 yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan alokasi minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Akan tetapi fenomena yang berkembang saat ini anggaran 20% dari total APBN/APBD yang telah di alokasikan oleh pemerintah untuk belanja daerah di bidang pendidikan belum efektif dalam pemanfaatannya sehingga manfaat yang di timbulkan dari belanja daerah di bidang pendidikan ini belum secara signifikan baik untuk meningkatkan kualitas di bidang pendidikan nasional (Juanda, 2021). Sebagaimana pernyataan dari menteri keuangan Sri Mulyani yang di lansir dari Detik.com mengatakan “Hasil Alokasi Anggaran Pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN/APBD tidak memuaskan Sekarang hampir 10 tahun mengadopsi 20 persen anggaran pendidikan di APBN/APBD Namun hasilnya tidak sebesar seperti di Vietnam, Sri Mulyani memastikan anggaran 20 persen pendidikan akan tetap dikucurkan oleh pemerintah karena amanat undang-undang Anggaran tetap akan dialokasikan namun bagaimana kita menggunakan (harus diubah),” kata dia.

Banyak peneliti sebelumnya menganalisis mengenai pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah di bidang pendidikan baik itu dari pulau Jawa, Sulawesi dan dari hasil penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Dara Amelia, Muhammad Arfan , Syukriy (2019) Memperoleh hasil bahwasanya (1) dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sektor pendidikan (2) dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah sektor pendidikan (3) dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh negatif terhadap belanja daerah sektor pendidikan (4) dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan belanja daerah sektor pendidikan secara bersama-sama dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *outcomes* bidang pendidikan (5) dana bagi hasil dan dana alokasi umum memediasi secara parsial pengaruh belanja daerah sektor pendidikan dan *outcomes* bidang pendidikan (6) dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah tidak memediasi pengaruh belanja daerah sektor pendidikan dan *outcomes* bidang pendidikan.

Berdasarkan penelitian Kristina Handayani dalam (Laksono & Subowo, 2014), Pengaruh Pendapatan Daerah Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah Bidang Pendidikan di Sulawesi, dengan menggunakan sampel di 36 Kabupaten / Kota di Sulawesi, penelitian ini menunjukkan bahwa DAK mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan baik dengan lag maupun tanpa lag. Sedangkan Pendapatan Asli daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja daerah bidang pendidikan di kabupaten / kota di Sulawesi baik dengan lag atau tanpa lag pengaruh DAK lebih besar dibandingkan pengaruh PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan hal ini berarti telah terjadi *flypaper effect*. Pada penelitian Wulandari (2014), Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Pada penelitian Fadilah & Helmayunita (2020), Melda & Syofyan (2020) dan Ernayani (2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DBH dan PAD secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pada Kesempatan kali ini peneliti melakukan penelitian di Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan di karenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh dana alokasi khusus, dana alokasi umum, Dana bagi hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah di bidang pendidikan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data yang di lansir dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwasanya Sumatera Selatan tidak termasuk di dalam 10 provinsi dengan indeks pembangunan manusia Tertinggi di Indonesia yang mengukur perbandingan harapan hidup dan tingkat kualitas pendidikan suatu wilayah.



**Gambar 1. 10 Provinsi dengan indeks pembangunan manusia terbaik di Indonesia**  
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwasanya Provinsi Sumatera Selatan tidak masuk di dalam kategori Provinsi dengan Kualitas Pendidikan yang terbaik di Indonesia, Berangkat dari sini penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan apakah sumber pendapatan daerah seperti dana perimbangan yaitu dana alokasi khusus, dana alokasi umum, serta dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah belum berpengaruh dengan baik untuk membiayai belanja daerah di bidang pendidikan sehingga Provinsi Sumatera Selatan tidak Termasuk di dalam kategori provinsi dengan kualitas pendidikan yang terbaik di Indonesia.

**Tabel 1. Jumlah belanja daerah di bidang pendidikan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Kab/Kota	Belanja Daerah di Bidang Pendidikan (Dalam Ribuan)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Banyuasin	56,050	61,2430	71,243	78,143	75,2730
Empat Lawang	40,567	53,756	60,116	72,116	86,196
Lahat	50,980	60,773	69,773	84,773	95,773
Muara Enim	41,342	62,739	79,739	100,673	86,739
Musi Banyuasin	41,090	71,210	80,210	82,210	91,000
Musi Rawas	44,065	67,843	63,843	74,843	87,843
Musi Rawas Utara	38,300	72,121	70,121	82,121	93,100
Ogan Ilir	47,666	59,743	67,356	74,356	82,063
Ogan Komering Ilir	34,500	61,123	68,123	75,123	86,923
Ogan Komering Ulu	58,956	70,324	71,324	87,324	84,987
Ogan Komering Ulu Selatan	39,891	67,880	64,880	75,880	89,080
Ogan Komering Ulu Timur	32,564	64,980	61,980	71,980	87,180
Penukal Abab Lematang Ilir	40,012	53,900	69,100	68,100	76,879
Lubuk Linggau	42,760	61,456	76,456	80,456	94,956
Pagar Alam	50,900	72,985	75,985	90,185	94,185
Prabumulih	42,124	81,100	84,100	90,564	115,648
Palembang	50,110	91,845	81,845	100,945	90,458
Persentase dari Total APBD	20%	20%	20%	20%	20%

Sumber: bpk.go.id

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah belanja daerah di bidang pendidikan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan sedangkan 2020 sebanyak 3 Kabupaten dan 1 Kota mengalami penurunan ,sedangkan untuk persentase dari total jumlah dana APBD telah memenuhi standar 20% berdasarkan Undang Undang No 20 Tahun 2003 yaitu

Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Sektor Pendidikan dan Minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Artinya besaran jumlah belanja daerah di bidang pendidikan harus disesuaikan dengan total dari dana APBN dan APBD semakin besar jumlah APBN dan APBD maka akan semakin besar pula Jumlah anggaran untuk belanja daerah di bidang pendidikan karena belanja daerah di bidang pendidikan ini merupakan *mandatory Spending* pengeluaran atau belanja yang sudah di atur dalam undang undang yaitu minimal 20% dari Total APBN dan APBD.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan menggunakan dua jenis variabel, variabel independen dan variabel dependen. Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa "Penelitian kuantitatif adalah meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan." Penelitian Kuantitatif ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran seberapa besar pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap belanja daerah di bidang pendidikan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

### Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) "Variabel Penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya". Penelitian ini memiliki 4 (Empat) variabel independen (X) dan 1 (satu) Variabel (Y).

### Populasi dan Sampel

#### Populasi

Menurut Sugiyono Sugiyono (2018) "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya." Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek, dan bukan hanya sekedar jumlah pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki objek/subjek". Populasi dalam penelitian ini adalah 4 Kota, dan 13 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel 2. Daftar Populasi**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Pendidikan Daerah
1.	Kabupaten Banyuasin	✓
2.	Kabupaten Empat Lawang	✓
3.	Kabupaten Lahat	✓
4.	Kabupaten Muara Enim	✓
5.	Kabupaten Musi Banyuasin	✓
6.	Kabupaten Musi Rawas	✓
7.	Kabupaten Musi Rawas Utara	✓
8.	Kabupaten Ogan Ilir	✓
9.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	✓
10.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	✓
11.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	✓
12.	Kabupaten Ogan komering Ulu Timur	✓
13.	Kabupaten Pemukal Abab Lematang ilir	✓
14.	Kota Lubuk Linggau	✓
15.	Kota Pagar Alam	✓
16.	Kota Prabumulih	✓
17.	Kota Palembang	✓

Sumber : Data Diolah dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

### Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi" (Sugiyono, 2018). Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan konsep sensus/sampling total, dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Sehingga sampel penelitian ini adalah 4 Kota dan 13 Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sehingga Jumlah Sampel dalam Penelitian ini yaitu 17 Sampel.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data di peroleh dari laporan realisasi anggaran dan neraca pendidikan daerah di 4 Kota dan 13 Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera selatan selanjutnya data di kuantitatifkan kemudian di input dan di analisis menggunakan program SPSS.

Kemudian penelitian ini juga melakukan uji asumsi klasik, uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah hasil analisis regresi linier berganda yang di gunakan terbebas dari penyimpangan asumsi klasik (Ghozali, 2016) . uji asumsi klasik pada penelitian ini adalah normalitas, multikolinieritas, heterokedestisitas dan auto korelasi. Hasil uji asumsi klasik pada penelitian ini di nyatakan normalitas tidak terjadi multikolinieritas, heterokedestisitas dan auto korelasi, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi yang dipakai telah memenuhi asumsi klasik sehingga dapat di lanjutkan dengan analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

**Tabel 3. Hasil uji analisis linear berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>		Standardized		
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	17.94	2.571		6.999	.000
DBH (X1)	-.082	.089	-.112	-.923	.359
DAU (X2)	.246	.074	.374	3.323	.001
DAK (X3)	.161	.058	.291	2.782	.007
PAD (X4)	-.069	.050	-.153	-1.387	.169

a. Dependent Variable: Belanja Daerah di Bidang Pendidikan (Y)

Sumber: Output SPSS 24

Tabel 3 di atas memberikan hasil nilai konstanta dan koefisien regresi, sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 \quad (1)$$

$$= 1.945 - 0,082X_1 + 0,0246X_2 + 0,161X_3 - 0,69X_4 \quad (2)$$

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut :

1. Konstanta memiliki nilai sebesar 1.945, Nilai tersebut artinya apabila variabel dana bagi hasil per Kabupaten/Kota, dana alokasi umum per Kabupaten/Kota, dana alokasi khusus per Kabupaten/Kota dan pendapatan asli daerah per Kabupaten/Kota sebesar 0, maka variabel belanja di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota akan bernilai 1.945
2. Koefisien regresi variabel dana bagi hasil per Kabupaten/Kota memiliki nilai sebesar -0,082. Nilai tersebut artinya jika dana bagi hasil per Kabupaten/Kota meningkat, maka belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota juga menurun sebesar -0,082. Koefisien bernilai negatif, hal tersebut berarti terjadi hubungan negatif antara dana bagi hasil per Kabupaten/Kota dengan belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota. Semakin tinggi nilai dana bagi hasil per Kabupaten/Kota, maka tingkat belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota akan mengalami penurunan.
3. Koefisien regresi variabel dana alokasi umum per Kabupaten/Kota memiliki nilai sebesar 0,246. Nilai tersebut artinya jika dana alokasi umum per Kabupaten/Kota meningkat, maka belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota juga akan meningkat sebesar 0,246. Koefisien bernilai positif, hal tersebut berarti terjadi hubungan positif antara dana alokasi umum per Kabupaten/Kota dengan belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota. Semakin tinggi nilai dana alokasi

- umum per Kabupaten/Kota, maka tingkat belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota juga semakin tinggi.
- Koefisien regresi variabel dana alokasi khusus per Kabupaten/Kota memiliki nilai sebesar 0.161. Nilai tersebut artinya jika dana alokasi khusus per Kabupaten/Kota meningkat, maka belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota juga akan meningkat sebesar 0,161. Koefisien bernilai positif, hal tersebut berarti terjadi hubungan positif antara dana bagi hasil per Kabupaten/Kota dengan belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota. Semakin tinggi nilai dana bagi hasil per Kabupaten/Kota, maka tingkat belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota juga semakin tinggi.
  - Koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah per Kabupaten/Kota memiliki nilai sebesar -0,069. Nilai tersebut artinya jika pendapatan asli daerah per Kabupaten/Kota meningkat, maka belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota juga akan menurun sebesar -0,069. Koefisien bernilai negatif, hal tersebut berarti terjadi hubungan negatif antara pendapatan asli daerah per Kabupaten/Kota dengan belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota. Semakin tinggi nilai pendapatan asli daerah per Kabupaten/Kota, maka tingkat belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota juga semakin tinggi.

**Tabel 4. Hasil koefisien determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.362 <sup>a</sup>	.684	.143	.26459

a. Predictors: (Constant), PAD (X4), DAU (X2), DBH (X3), DAK(X1)

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,731 atau sebesar 68,4 %. Hal ini berarti bahwa 68,4 % variasi belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel dana bagi hasil per Kabupaten/Kota, dana alokasi umum per Kabupaten/Kota, dana alokasi khusus per Kabupaten/Kota, pendapatan asli daerah per Kabupaten. Sedangkan sisanya sebesar 31,6 % ( $100\% - 68,4\% = 31,6\%$ ) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model.

**Tabel 5. Hasil uji parsial (Uji Statistik t)**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	17.994	2.571		6.999	.000
DBH (X1)	-.082	.089	-.112	-.923	.359
DAU (X2)	.246	.074	.374	3.323	.001
DAK (X3)	.161	.058	.291	2.782	.007
PAD (X4)	-.069	.050	-.153	-1.387	.169

a. Dependent Variable: Belanja Daerah di Bidang Pendidikan (Y)

- Variabel dana bagi hasil per Kabupaten/Kota memiliki nilai t-hitung sebesar -923 dan nilai signifikansi sebesar 0.359. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel ( $-923 < 1.990$ ) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $0,359 > 0,05$ ), sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dana bagi hasil per Kabupaten/Kota tidak memiliki pengaruh terhadap variabel per Kabupaten/Kota. Maka dapat diketahui bahwa  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima, artinya dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil per Kabupaten/Kota tidak berpengaruh berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota.
- Variabel dana alokasi umum per Kabupaten/Kota memiliki nilai t-hitung sebesar 3.323 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ( $3.323 > 1.990$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ), sehingga dapat dikatakan bahwa variabel dana alokasi umum per Kabupaten/Kota memiliki pengaruh terhadap

variabel belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota. Maka dapat diketahui bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum per Kabupaten/Kota berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota.

3. Variabel alokasi dana alokasi khusus per Kabupaten/Kota memiliki nilai t-hitung sebesar 2.782 dan nilai signifikansi sebesar 0,007. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ( $2.782 > 1.990$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,007 < 0,05$ ), sehingga dapat dikatakan bahwa variabel alokasi dana alokasi khusus per Kabupaten/Kota memiliki pengaruh terhadap variabel belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota. Maka dapat diketahui bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil per Kabupaten/Kota berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota.
4. Variabel pendapatan asli daerah per Kabupaten/Kota memiliki nilai t-hitung sebesar -1.387 dan nilai signifikansi sebesar 169. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel ( $-1.387 < 1.990$ ) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ( $169 > 0,05$ ), sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah per Kabupaten/Kota tidak memiliki pengaruh terhadap variabel belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota. Maka dapat diketahui  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima, artinya dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah per Kabupaten/Kota tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota.

**Tabel 6. Uji silmutan (Uji statistik F)**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2.523	4	.631	4.501	.002 <sup>b</sup>
Residual	11.213	80	.140		
Total	13.736	84			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah di Bidang Pendidikan (Y)

b. Predictors: (Constant), PAD (X4), DAU (X2), DAK (X3), DBH (X1)

Tabel 6 di atas diketahui bahwa nilai F-hitung sebesar 4.501 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 4.501 lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 2,486 dan nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana bagi hasil per Kabupaten/Kota, dana alokasi umum per Kabupaten/Kota, dana alokasi khusus per Kabupaten/Kota, pendapatan asli daerah per Kabupaten/Kota, (simultan) mempengaruhi variabel belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota.

### **Pembahasan**

#### **Dana Bagi Hasil secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Bidang Pendidikan per Kabupaten/Kota**

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial), nilai t-hitung untuk variabel dana bagi hasil per Kabupaten/Kota adalah sebesar -923. Nilai t-hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t-tabel ( $-923 > 1,990$ ), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel dana bagi hasil per Kabupaten/Kota tidak berpengaruh terhadap variabel belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Bidang Pendidikan per Kabupaten/Kota**

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial), nilai t-hitung untuk variabel dana alokasi umum per Kabupaten/Kota adalah sebesar 3.323. Nilai t-hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t-tabel ( $3.323 > 1,990$ ), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel dana alokasi umum per Kabupaten/Kota secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

### **Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Bidang Pendidikan per Kabupaten/Kota**

Berdasarkan hasil uji t (parsial), nilai t-hitung untuk variabel dana alokasi khusus per Kabupaten/Kota adalah sebesar 2.782. Nilai t-hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t-tabel ( $2,782 > 1,990$ ), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel dana alokasi khusus per Kabupaten/Kota secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

### **Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Bidang Pendidikan per Kabupaten/Kota**

Berdasarkan hasil uji t (uji parsial), nilai t-hitung untuk variabel pendapatan asli daerah per Kabupaten/Kota adalah sebesar -1.387. Nilai t-hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t-tabel ( $-1,387 < 1,990$ ), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota secara parsial berpengaruh negative terhadap variabel belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

### **Dana Alokasi Khusus per Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Umum per Kabupaten/Kota, Dana Bagi Hasil per Kabupaten/Kota, Pendapatan Asli Daerah per Kabupaten/Kota, secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota**

Berdasarkan hasil uji F (uji simultan), nilai F-hitung sebesar 4.501 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Nilai F-hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai F-tabel ( $4,501 > 2,486$ ) dan nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 ( $0,007 < 0,05$ ), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel dana alokasi khusus per Kabupaten/Kota, dana alokasi umum per Kabupaten/Kota, dana bagi hasil per Kabupaten/Kota, pendapatan asli daerah per Kabupaten/Kota, secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

## **KESIMPULAN**

Setelah dilakukan pengujian data dan analisis hasil pengujian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dana alokasi khusus per Kabupaten/Kota secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dana alokasi umum per Kabupaten/Kota secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dana bagi hasil per Kabupaten/Kota secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pendapatan asli Daerah per Kabupaten/Kota secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di bidang pendidikan per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dana alokasi khusus per Kabupaten/Kota, dana alokasi umum per Kabupaten/Kota, dana bagi hasil per Kabupaten/Kota, pendapatan asli daerah per Kabupaten/Kota, secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(2). <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/4598>
- Amelia, D., Arfan, M., & Abdullah, S. (2019). Analisis belanja daerah sektor pendidikan sebagai mediasi pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap outcomes bidang pendidikan pada pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 5(1), 48–69. <https://jurnal.usk.ac.id/JPED/article/view/13822>
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah (Studi kasus pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur periode 2009-2013). *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1(1), 43–52. <https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234>

- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis flypaper effect pada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah provinsi di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3144–3159. <http://jea.ppp.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/273>
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130>
- Febriani, D., & Asmara, J. A. (2018). Pengaruh sisa anggaran, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal fungsi pendidikan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(4), 585–599. <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/10672>
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 14(1), 44–52. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/3546/359>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Juanda, J. (2021). Anomali anggaran pendidikan dalam pengaturan dan praktek. "Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), 18. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss2/18/>
- Laksono, B. B., & Subowo, S. (2014). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4). <https://journal.unnes.ac.id/sju/aaj/article/view/4207>
- Melda, H., & Syofyan, E. (2020). Analisis flypaper effect pada dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2826–2838. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.252>
- Monicha, A. V. (2019). *Sistem penerimaan kas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara. <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/21108>
- Simanjuntak, L., Subeki, A., Ferina, I. S., & Yusrianti, H. (2013). Analysis of flypaper effect in general allocation fund and regional original income to regional expenditure of districts and cities in South Sumatera. *Jurnal Akuntansi Publik*, 1(2). <https://repository.unsri.ac.id/19418/>
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Wulandari, Y. (2014). Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 2(1). <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/862>